

**DETERMINASI PENYEBAB KETIDAKBERHASILAN DALAM
PENCAPAIAN OPINI WTP: ANALISIS PADA
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : TEGAR GALANG ANANTHA

NIM : 126231038

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2024

LAPORAN TUGAS AKHIR
DETERMINASI PENYEBAB KETIDAKBERHASILAN DALAM
PENCAPAIAN OPINI WTP: ANALISIS PADA
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : TEGAR GALANG ANANTHA

NIM : 126231038

UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT UNTUK KELULUSAN
PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2024

**DETERMINASI PENYEBAB KETIDAKBERHASILAN DALAM
PENCAPAIAN OPINI WTP: ANALISIS PADA
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

Laporan Tugas Akhir

Disusun oleh:



Tegar Galang Anantha

126231038

Disetujui oleh:

Pembimbing



Henryanto Wijaya, S.E., M.M., Ak., CA.

ABSTRAK

Penelitian ini mengidentifikasi determinasi yang menyebabkan kegagalan pemerintah daerah di Indonesia dalam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Tahun Anggaran 2020 hingga 2022. Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan untuk menyelidiki lebih mendalam faktor-faktor penyebab kegagalan tersebut. Penelitian ini menganalisis 143 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD yang mendapatkan opini selain WTP pada 81 entitas pemerintah daerah. Data LHP LKPD tersebut didapatkan melalui permintaan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK sebagai pelaksana tugas teknis PPID BPK. Berdasarkan data tersebut dilakukan identifikasi atas faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan dalam pencapaian opini WTP pada pemerintah daerah di Indonesia dengan mengelompokkan pada beberapa kategori yaitu permasalahan pada kelompok akun-akun yang disajikan tidak sesuai SAP, permasalahan pada kelompok jenis temuan kelemahan SPI, permasalahan pada kelompok jenis temuan kelemahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan permasalahan berulang pada masing-masing entitas. Pengelompokan permasalahan tersebut mengacu pada Keputusan BPK RI No.5/K/I-XIII.2/8/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Koding Temuan Pemeriksaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kegagalan pemerintah daerah dalam mencapai opini WTP selama tahun anggaran 2020–2022 dipengaruhi oleh tiga faktor utama: (1) Penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan SAP, terutama pada kelompok akun aset tetap, aset lancar, belanja modal, beban operasi, kewajiban jangka pendek, pendapatan, dan belanja tak terduga. (2) Kelemahan dalam SPI, meliputi sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, serta sistem pengendalian anggaran yang tidak optimal. (3) Ketidakpatuhan terhadap regulasi, yang seringkali mencakup penyimpangan administrasi, potensi kerugian, serta kekurangan dalam pengawasan. Lebih lanjut, ditemukan pula adanya masalah berulang, khususnya pada kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, selama dua hingga tiga tahun berturut-turut. Penelitian ini hanya berfokus pada periode 2020-2022, sehingga penelitian ini tidak menjelaskan secara detail penyebab struktural atau sistemik di luar yang teridentifikasi oleh audit, sehingga ada kemungkinan adanya faktor lain yang berperan tetapi belum diungkapkan.

Kata kunci: Kelemahan SPI, Ketidakpatuhan, Opini Audit, Salah Saji, Temuan Berulang

ABSTRACT

This study identifies the determinants behind the failure of local governments in Indonesia to obtain Unqualified Opinions on their Local Government Financial Statements (LGFS) for the 2020–2022 fiscal years. A descriptive quantitative approach was employed to investigate the factors contributing to this failure. The research analyzed 143 Audit Reports of LGFSs that received opinions other than Unqualified Opinions, involving 81 local government entities. The Audit Reports data were obtained by requesting information through the Public Information and Documentation Officer (PIDO) at the Information and Communication Center (ICC) of BPK, acting as the technical executor of PIDO. Based on these data, the study identified factors leading to the failure in achieving Unqualified Opinions among local governments in Indonesia by categorizing them into several groups: issues related to account groups not presented in compliance with Government Accounting Standards (GAS), findings of weaknesses in the Internal Control System (ICS), findings of non-compliance with statutory regulations, and recurring problems in each entity. The categorization of these issues refers to BPK RI Decree No. 5/K/I-XIII.2/8/2010 dated August 27, 2010, on Technical Guidelines for Audit Findings Coding. The analysis results indicate that the failure of local governments to achieve Unqualified Opinions during the 2020–2022 fiscal years was influenced by three main factors: Non-compliance with GAS in financial statement presentation, particularly in account groups such as fixed assets, current assets, capital expenditures, operating expenses, short-term liabilities, revenues, and unexpected expenditures. Weaknesses in the ICS, including suboptimal accounting and reporting control systems as well as budget control systems. Non-compliance with regulations, often involving administrative deviations, potential losses, and deficiencies in oversight. Additionally, recurring issues were found, particularly in ICS weaknesses and non-compliance with regulations, persisting for two to three consecutive years. This study focuses exclusively on the 2020–2022 period, and therefore does not detail structural or systemic causes beyond those identified through audits, leaving the possibility of other contributing factors unaddressed.

Keywords: Weaknesses in ICS, Non-compliance, Audit Opinion, Misstatements, Recurring Findings

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segalakerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
5. Henryanto Wijaya, S.E., M.M., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan.
7. Teman-teman dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Jakarta, Desember 2024

Tegar Galang Anantha

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	3
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Teori Keagenan.....	6
2.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	7
2.3 Opini Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah	10
2.4 Kriteria Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	12
2.5 Penelitian Terdahulu	13
BAB III METODE PENELITIAN.....	16
3.1 Desain Penelitian	16
3.2 Populasi dan Sampel.....	16
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	17
3.4 Teknik Analisis Data.....	17
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	18
4.1 Hasil	18
4.1.1 Akun-Akun yang Disajikan Tidak Sesuai SAP	18
4.1.2 Kelemahan SPI.....	33
4.1.3 Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan ..	36

4.1.4 Permasalahan Berulang.....	39
4.2 Pembahasan.....	42
4.2.1 Akun-Akun yang Disajikan Tidak Sesuai SAP	42
4.2.2 Kelemahan SPI.....	43
4.2.3 Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan...	44
4.2.4 Temuan Berulang	45
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	47
DAFTAR PUSTAKA	49

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Temuan berulang atas kelemahan sistem pengendalian skuntansi dan pelaporan	39
Tabel 4.2 Temuan berulang atas kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	40
Tabel 4.3 Temuan berulang atas kelemahan struktur pengendalian intern	40
Tabel 4.4 Temuan berulang atas kerugian.....	41
Tabel 4.5 Temuan berulang atas potensi kerugian	41
Tabel 4.6 Temuan berulang atas kekurangan penerimaan	41
Tabel 4.7 Temuan berulang atas penyimpangan administrasi	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kelompok akun-akun yang disajikan tidak sesuai SAP Tahun 2020-2022	18
Gambar 4.2 Rincian kelompok akun aset tetap yang disajikan tidak sesuai SAP Tahun 2020-2022	19
Gambar 4.3 Rincian kelompok akun aset lancar yang disajikan tidak sesuai SAP Tahun 2020-2022	21
Gambar 4.4 Rincian kelompok akun aset lainnya yang disajikan tidak sesuai SAP Tahun 2020-2022	24
Gambar 4.5 Rincian kelompok akun kewajiban jangka pendek yang disajikan tidak sesuai SAP Tahun 2020-2022	25
Gambar 4.6 Rincian kelompok akun pendapatan yang disajikan tidak sesuai SAP Tahun 2020-2022	26
Gambar 4.7 Rincian kelompok akun belanja operasi yang disajikan tidak sesuai SAP Tahun 2020-2022	28
Gambar 4.8 Rincian kelompok akun belanja modal yang disajikan tidak sesuai SAP Tahun 2020-2022	29
Gambar 4.9 Rincian kelompok akun beban operasi yang disajikan tidak sesuai SAP Tahun 2020-2022	31
Gambar 4.10 Rincian kelompok akun lainnya yang disajikan tidak sesuai SAP Tahun 2020-2022	32
Gambar 4.11 Rincian kelemahan SPI yang mendasari opini Non WTP Tahun 2020-2022.....	34
Gambar 4.12 Rincian permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	34
Gambar 4.13 Rincian kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	35
Gambar 4.14 Rincian kelemahan struktur pengendalian intern	35
Gambar 4.15 Rincian ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari opini Non WTP Tahun 2020-2022	36
Gambar 4.16 Rincian permasalahan penyimpangan administrasi	37
Gambar 4.17 Rincian permasalahan kerugian	37
Gambar 4.18 Rincian permasalahan potensi kerugian	38
Gambar 4.19 Rincian permasalahan kekurangan penerimaan	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Sampel Penelitian	52
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dianggap sebagai indikator kinerja tata kelola keuangan yang baik untuk pemerintah daerah (Pemerintah Indonesia, 2020). Opini ini menandakan bahwa laporan keuangan daerah telah disusun dengan wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tanpa temuan signifikan yang memerlukan pengecualian (Badan Pemeriksa Keuangan, 2021). Meskipun demikian, meskipun sudah ada standar dan pedoman yang jelas, tidak semua pemerintah daerah di Indonesia mampu meraih opini WTP.

Periode 2020 hingga 2022 merupakan masa yang penuh tantangan bagi banyak pemerintah daerah di Indonesia akibat dampak pandemi COVID-19, yang mempengaruhi kemampuan fiskal, prioritas pengeluaran, serta pelaksanaan program-program pemerintah (Bachtiar et al., 2022). Penurunan pendapatan daerah serta perubahan alokasi anggaran untuk menangani pandemi diperkirakan turut mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan serta kemampuan daerah dalam memenuhi kriteria opini WTP. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan beberapa pemerintah daerah gagal mendapatkan opini WTP (Suparman, 2021). Pemerintah daerah menghadapi krisis keuangan, baik karena kesalahan pengelolaan anggaran, ketidakmampuan memaksimalkan pendapatan asli daerah, maupun akibat bencana atau kejadian luar biasa seperti pandemic yang berakibat pada penurunan pertumbuhan ekonomi (Widoatmodjo & Setyawan, 2023)

Secara umum, faktor yang mempengaruhi opini audit BPK terkait dengan aspek pengelolaan keuangan, tata kelola pemerintahan, sistem pengendalian internal, serta kapasitas sumber daya manusia (Auliyana, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor tersebut yang berkaitan pada ketidaksesuaian penyajian atas SAP, kelemahan sistem pengendalian internal, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta permasalahan berulang yang menyebabkan ketidakberhasilan pencapaian opini WTP dalam kurun waktu dua sampai tiga tahun berturut-turut pada pemerintah

daerah di Indonesia atas LKPD Tahun Anggaran 2020 hingga 2022 guna memberikan rekomendasi perbaikan yang relevan.

Dalam ranah regulasi, paket undang-undang di bidang keuangan yang terdiri atas UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menjadi landasan reformasi manajemen keuangan negara. Undang-undang ini mengatur kewajiban presiden dan kepala daerah untuk menyampaikan laporan keuangan kepada DPR/DPRD setelah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya enam bulan setelah akhir tahun anggaran (Republik Indonesia, 2003).

Pemerintah daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri atas berbagai laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pemeriksaan atas LKPD dilakukan oleh BPK, yang kemudian menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada DPRD dan kepala daerah. Hasil pemeriksaan ini mencakup opini yang diberikan antara lain WTP, Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak Memberikan Opini (TMP) (Badan Pemeriksa Keuangan, 2021).

Opini WTP merupakan pencapaian tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah. Pencapaian opini WTP menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengelola keuangannya dengan baik, sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik. Opini ini juga dianggap sebagai cerminan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan prinsip *good governance* dan meningkatkan kepercayaan publik (Moalla, 2017).

Namun, berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK untuk periode anggaran 2020 hingga 2022, masih ada pemerintah daerah yang gagal meraih opini WTP. Data menunjukkan bahwa pada 2020, 18 entitas mengalami penurunan opini dibandingkan tahun sebelumnya, sementara pada 2021 dan 2022, masing-masing 10 dan 19 entitas mengalami penurunan opini. Dalam tiga tahun tersebut, terdapat 19 entitas yang dua tahun berturut-turut gagal memperoleh opini WTP, dan 21 entitas yang tidak meraihnya selama tiga tahun berturut-turut (Supreme Audit Agency (BPK) RI, 2023).

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 542 LKPD yang diperiksa, 91% diberikan opini WTP, 8% WDP, dan 1% TMP. Capaian ini dibandingkan dengan target RPJMN 2020-2024 menunjukkan beberapa pencapaian opini pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten telah mencapai target, sementara pada pemerintah kota masih berada dibawah target capaian. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pencapaian opini WTP mengalami fluktuasi (Supreme Audit Agency (BPK) RI, 2023).

Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada faktor yang mendukung pencapaian opini WTP (Auliyana, 2017; Kuntadi, 2020; Maffei et al., 2020; Moalla, 2017; Rahayu & Fidiana, 2018; Saleh & Rahadian, 2023). Penelitian ini mengkaji penyebab kegagalan dalam meraih opini tersebut. Analisis ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam terkait hambatan dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah yang mungkin terlewatkan oleh penelitian sebelumnya.

Lebih lanjut, penelitian ini membawa kebaruan dengan mengaplikasikan *agency theory* (Jensen & Meckling, 1994) dalam konteks pemerintah daerah, suatu pendekatan yang jarang digunakan dalam literatur audit sektor publik di Indonesia. *Agency theory* digunakan untuk menganalisis hubungan antara pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat atau pemerintah pusat sebagai prinsipal, serta untuk memahami masalah keagenan, asimetri informasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang berkaitan dengan kegagalan memperoleh opini WTP. Auditor eksternal pemerintah (BPK) berperan sebagai pihak ketiga dalam teori keagenan, yang mampu menjembatani perbedaan antara agen dan prinsipal terkait pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara/daerah (Indra et al., 2022). Oleh karena itu pertanyaan penelitian ini adalah Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pemerintah daerah di Indonesia gagal mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangannya?

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa belum seluruhnya pemerintah daerah di Indonesia mencapai opini WTP, meskipun telah ada standar dan pedoman yang jelas. Selain itu terdapat pemerintah daerah yang secara berturut-turut mendapatkan opini non WTP dalam kurun waktu dua sampai tiga tahun. Oleh karena itu diperlukan identifikasi faktor-faktor yang berkaitan pada ketidaksesuaian

penyajian atas SAP, kelemahan sistem pengendalian internal, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan belum tercapainya opini WTP dan apakah terdapat permasalahan yang berulang pada entitas yang berturut-turut dalam kurun waktu dua sampai tiga tahun tidak mencapai opini WTP pada seluruh pemerintah daerah di Indonesia sehingga perlu diadakan penelitian berjudul **“Determinasi Penyebab Ketidakberhasilan dalam Pencapaian Opini WTP: Analisis pada Pemerintah Daerah di Indonesia”**.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang dibahas sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana permasalahan pada kelompok akun-akun yang disajikan tidak sesuai SAP yang menyebabkan ketidakberhasilan dalam pencapaian opini WTP pada pemerintah daerah di Indonesia atas LKPD Tahun Anggaran 2020 hingga 2022?
2. Bagaimana permasalahan pada kelompok jenis temuan kelemahan SPI yang menyebabkan ketidakberhasilan dalam pencapaian opini WTP pada pemerintah daerah di Indonesia atas LKPD Tahun Anggaran 2020 hingga 2022?
3. Bagaimana permasalahan pada kelompok jenis temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketidakberhasilan dalam pencapaian opini WTP pada pemerintah daerah di Indonesia atas LKPD Tahun Anggaran 2020 hingga 2022?
4. Apakah terdapat permasalahan berulang dalam kurun waktu tiga tahun yang menyebabkan ketidakberhasilan dalam pencapaian opini WTP pada pemerintah daerah di Indonesia atas LKPD Tahun Anggaran 2020 hingga 2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. mengetahui permasalahan pada kelompok akun-akun yang disajikan tidak sesuai SAP yang menyebabkan ketidakberhasilan dalam pencapaian opini

WTP pada pemerintah daerah di Indonesia atas LKPD Tahun Anggaran 2020 hingga 2022;

2. mengetahui permasalahan pada kelompok jenis temuan kelemahan SPI yang menyebabkan ketidakberhasilan dalam pencapaian opini WTP pada pemerintah daerah di Indonesia atas LKPD Tahun Anggaran 2020 hingga 2022;
3. mengetahui permasalahan pada kelompok jenis temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketidakberhasilan dalam pencapaian opini WTP pada pemerintah daerah di Indonesia atas LKPD Tahun Anggaran 2020 hingga 2022; dan
4. mengetahui permasalahan berulang yang menyebabkan ketidakberhasilan dalam pencapaian opini WTP dalam kurun waktu dua sampai tiga tahun berturut-turut pada pemerintah daerah di Indonesia atas LKPD Tahun Anggaran 2020 hingga 2022.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk studi yang berhubungan dengan audit sektor publik.

1.5.2 Manfaat bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan akuntabilitas publik salah satunya dalam pelaporan keuangan daerah sehingga dapat mencapai opini WTP.

1.5.3 Manfaat bagi Pemeriksa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemeriksa untuk mengetahui akun-akun dan jenis temuan yang mempengaruhi opini.

1.5.4 Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu persyaratan mencapai gelar Ak Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara. Peneliti juga dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai audit sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriawan, A., & Setyawan, I. R. (2020). Earning Management Actions and Conditional Revenue as Managerial Efforts to Maintain Bond Rating. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 23(03), 349–372. <https://doi.org/10.33312/ijar.484>
- Auliyana, E. (2017). Studi Kasus Fenomenologi Atas Opini Audit Wtp Di Kalangan Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 4(1), 22–33. <https://doi.org/10.17977/um004v4i12017p022>
- Bachtiar, P. P., Vandenberg, P., & Sawiji, H. W. (2022). Adb Briefs: City-Level Tech Startup Ecosystems and Talent Development in Indonesia. *Adb Briefs*, 4(100), 1–12.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2021). Petunjuk Teknis Pemeriksaan Laporan Keuangan. In *BPK Republik Indonesia*.
- BPK. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Indra, I., Iskak, J., & Khaq, A. (2022). Enhancing the Role of the Audit Board of the Republic of Indonesia in Fraud Detection. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(2), 131–143. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i2.935>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1979). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure “نظرية الشركة: السلوك الإداري، تكاليف الوكالة، وهيكل الملكية.” *Journal of Financial Economics*, 3(4), 163–231. <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0304405X7690026X>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1994). Agency Theory. *Journal of Applied Corporate Finance*, Summer.
- Kuntadi, C. (2020). The Effect of Lowballing on Auditor Independence and Audit Opinion (Case Study at the Public Accounting Office for the Special Capital Region of Jakarta). *Research Journal of Finance and Accounting*, 11(4), 42–51. <https://doi.org/10.7176/rjfa/11-4-05>
- Maffei, M., Fiondella, C., Zagaria, C., & Zampella, A. (2020). A multiple discriminant analysis of the auditor’s going concern opinion: the case of audit opinions in Italy. *Meditari Accountancy Research*, 28(6), 1179–1208. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-06-2019-0514>
- Moalla, H. (2017). Audit report qualification/modification: Impact of financial variables in Tunisia. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 7(4), 468–485. <https://doi.org/10.1108/JAEE-10-2016-0092>
- Ningsih, S. (2016). The Antecedents of Non-Unqualified Opinions of Local Governments Financial Statements: A Study on Counties and Cities in East Java Province. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 16–27. <https://doi.org/10.1108/AJAR-2016-01-01-B003>
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency theory: Review of theory and evidence

- on problems and perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(1), 74–95. <https://doi.org/10.1177/0974686217701467>
- Pemerintah Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaam Keuangan Daerah. 2020.
- Rahayu, F. I. S., & Fidiana, F. (2018). Derterminan Kualitas Opini Audit Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 267–279. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9016>
- Republik Indonesia. (2003). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA* (Vol. 17).
- Robson, L. S., Macdonald, S., Gray, G. C., Van Eerd, D. L., & Bigelow, P. L. (2012). A descriptive study of the OHS management auditing methods used by public sector organizations conducting audits of workplaces: Implications for audit reliability and validity. *Safety Science*, 50(2), 181–189. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2011.08.006>
- Rufaedah, Y. (2021). Analisis Faktor-Faktor Penghambat Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Wtp) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) Kabupaten Bandung Barat. *Sigma-Mu*, 12(2), 44–64. <https://doi.org/10.35313/sigmamu.v12i2.2584>
- Saleh, I., & Rahadian, Y. (2023). *Indonesian Treasury Review Akar Masalah Tidak Tercapainya Opini Wtp: Studi Kasus Di Pemerintah Daerah Xx*. 8(2023), 109–124.
- Schillemans, T., & Bjurstrøm, K. H. (2020). Trust and verification: balancing agency and stewardship theory in the governance of agencies. *International Public Management Journal*, 23(5), 650–676. <https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1553807>
- Scott, W. R. (1965). Reactions to Supervision in a Heteronomous Professional Organization. *Administrative Science Quarterly*, 10(1), 65. <https://doi.org/10.2307/2391650>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research methods for business : a skill-building approach. John Wiley & Sons, Seventh ed. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Setijaningsih, H. T., Handoyo, S. E., & Sundari, N. (2021). Factors Affecting The Selection of Fair Value Methods for Investment Property. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 17(1), 111–129. <https://doi.org/10.33830/jom.v17i1.1052.2021>
- Setyawan, I. R., Ekadjaja, M., & Ekadjaja, A. (2022). *Industry Market Structure and Banking Performance in Indonesia*. 2012, 346–354.
- Siedlecki, S. L. (2020). Understanding Descriptive Research Designs and Methods. *Clinical Nurse Specialist*, 34(1), 8–12. <https://doi.org/10.1097/NUR.0000000000000493>
- Suparman, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan*

Negara Dan Kebijakan Publik, 6(1), 31–42.
<https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.261>

Supreme Audit Agency (BPK) RI. (2023). Overview of Examination Results for the first Semester. *Overview of Examination Result for the First Semester* , 1, 1–288.

Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1983). Agency Problems, Auditing, and the Theory of the Firm: Some Evidence. *The Journal of Law and Economics*, 26(3), 613–633. <https://doi.org/10.1086/467051>

Widoatmodjo, S., & Setyawan, I. R. (2023). Special Treatment to Bank CEOs in Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 12(2), 137–147. <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0037>